

## **SEGREGASI GENDER DALAM MANAJEMEN PESERTA DIDIK DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

*Titis Thoriquttyas<sup>1</sup>, Nita Robmawati<sup>2</sup>*

Universitas Negeri Malang<sup>1</sup>, PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>2</sup>  
[titisthoriq.fs@um.ac.id](mailto:titisthoriq.fs@um.ac.id)<sup>1</sup> [nitarobmawati3@gmail.com](mailto:nitarobmawati3@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Tracing back through the historical line of Indonesian Islamic Schooling, the management model of gender segregation can be analyzed explicitly. This research will trace the model of gender's segregation which concerned on the management of learner and it involving the indicators of gender analysis, namely the access and the participation as well as the Gender Analysis Pathway (GAP). This research conducted in MA Sunan Pandanaran Yogyakarta due to some scientific reasons. From the brief explanation above, the research will be concerned on: First, the management of learner and its relevance on the model of gender's segregation. Second, analytical relationship based on the indicators of GAP and the indicator of access as well as participation of learners. To sum up, Islamic school had the unique model of relationship between gender and the management model in the learning process; it is classified into the biased-gender and the neutral-gender.*

**Keywords:** *Gender Segregation; Islamic School; The Management of Learners*

**Abstrak.** Menelusuri kembali melalui kajian kesjaraan dari perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia, model manajemen dengan mengedepankan segregasi gender dapat ditemui secara eksplisit. Penelitian ini akan mengkajinya model segregasi gender yang berfokus pada tata kelola peserta didik dan itu melibatkan analisis indikator gender yang meliputi indikator Akses dan Partisipasi serta analisis melalui GAP. Penelitian ini dilakukan pada MA Sunan Pandanaran Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan akademik. Dari penjelasan singkat diatas, penelitian ini akan berfokus pada: 1). Tata kelola peserta didik dan kaitannya dalam model segregasi gender. 2). Analisis keterkaitannya didasarkan pada indikator GAP dan indikator akses serta partisipasi dari peserta didik. Kesimpulannya, Lembaga pendidikan Islam mempunyai model relasi yang unik antara konsep gender dan model tata kelola peserta didiknya dalam proses pembelajarannya, hal itu diklasifikasikan dalam dua model, model bias gender dan model netral gender.

**Kata Kunci:** Segregasi Gender; Lembaga Pendidikan Islam; Tata Kelola Peserta didik.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan salah satu bahasan dalam Tesis yang ditulis Peneliti yang membahas mengenai peserta didik dan perbedaannya secara mendasar dari segi biologis, sosial dan budaya dalam lingkup dunia pendidikan, menimbulkan beberapa peraturan, kebiasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini direspon positif oleh dunia pendidikan diberbagai belahan dunia, dimana beberapa lembaga pendidikan menerapkan sistem terpisah antara laki-laki dan perempuan, pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan kelas atau keseluruhan aktifitas lainnya antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian disebut dengan sistem segregasi gender. Di belahan Dunia Barat seperti di Amerika Serikat, pada tahun 2009 terdapat lebih dari 550 sekolah yang menerapkan sistem pemisahan kelas berdasarkan jenis kelamin yang populer dengan istilah *Single Sex Public Education (SSPE)*.

Segregasi ini berasal dari prinsip utama SSPE bahwa anak laki-laki berkembang dalam suasana persaingan sementara anak perempuan memerlukan suasana yang lebih tenang dan lingkungan belajar yang kooperatif.<sup>1</sup>

Di belahan dunia Timur, tidak jarang dalil agama juga berkontribusi memunculkan sebuah pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur dalam satu tempat, namun jika harus bercampur maka dipisahkan dengan tirai pembatas. Pemahaman tersebut dapat ditemui dalam kitab *I'anatut Tholibin* Bab Shalat yang menjelaskan larangan *ikhtilath* atau bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam majelis tertentu. Pada tahun 1930, *Nabdhatul Ulama* merintis sebuah praktik pendidikan yang sedikit berbeda dengan pendidikan pada umumnya yaitu penerapan kebijakan Segregasi gender dan salah satu lembaga yang menerapkan sistem tersebut adalah Pesantren Rejoso Peterongan, Jombang.<sup>2</sup>

Terkait penerapan sistem Segregasi gender dalam dunia pendidikan ini muncul bipolaritas pendapat: *pertama*, kelompok yang mendukung dan kedua, kelompok yang tidak mendukung terhadap penerapannya. Untuk kelompok yang mendukung beralasan bahwa setiap peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan kondisi alamiah mereka. Sedangkan bagi kelompok yang tidak mendukung mempunyai alasan bahwa sistem ini disinyalir akan menimbulkan hubungan yang kaku dan tidak alami antara laki-laki dan perempuan. Segregasi gender dalam pendidikan kemungkinan akan

---

<sup>1</sup> Humaidi, Anis, Evi Muafiah, Masnun Tahir, Asliah Zainal, Rubaidi, *Problematika Pemikiran Islam Kontemporer Tantangan bagi Wacana Islamologi di Indonesia*, Yogyakarta: Maghza Pustaka

<sup>2</sup> Khalid Mawardi, "Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda", 2008, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Wanita, STAIN Purwokerto, Vol.3, No.2, 45

menciptakan kehidupan sosial yang bias gender jika sistem atau kebijakan yang diterapkan serta perlakuan yang diterima berbeda antara laki-laki dan perempuan. Serta, adanya perbedaan perlakuan tersebut dapat mematikan kreatifitas khususnya peserta didik perempuan, dimana laki-laki dianggap sebagai makhluk maskulin yang selalu mendominasi, yang ini akan menimbulkan ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan.

Dalam kaitannya mengenai peserta didik dan manajemennya pada proses pembelajaran, keberadaan komponen peserta didik sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses transformasi pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan.<sup>3</sup> Oleh karena itu keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi merupakan bagian dari kebermutuan dari lembaga pendidikan. Ini berarti bahwa dibutuhkan manajemen peserta didik yang bermutu bagi lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga peserta didik itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

Demi menghindari adanya pengulangan kajian dan juga untuk mencari posisi dari penelitian ini, berikut akan dipaparkan beberapa kajian terdahulu, sejauh yang dapat dilacak oleh peneliti sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Perbandingan kajian Terdahulu dan Distingisinya**

No	Penelitian Terdahulu	Distingsi Penelitian
1.	Iwan Sudrajat dan Bambang Triyoga, Segregasi Gender dalam Organisasi Spasial	Penelitian ini berfokus pada penataan pola spasial yang berkaitan dengan pengendalian hubungan gender berupa segregasi antara zona santri pria dan santri wanita. Penelitian

<sup>3</sup> Engkoswara dan Hj. Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 85

	Pesantren di Pulau Jawa, <i>Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB)</i> , Vol. 27, No. 2, PP. 91-102, Agustus 2016	ini menggunakan perspektif spasial dilingkungan pesantren-pesantren besar di Jawa. Distingsi Penelitian ini berupa fokus pembahasannya yang lebih mengkaji pada sisi ruang-ruang lembaga pendidikan dengan fokus pada tata kelola sistem peserta didik
2	Bahrul Hayat, Perempuan dan Pendidikan dalam Perspektif HAM, <i>Millah: Jurnal Studi Agama UII</i> Vol. XII, No. 1, Agustus 2012	Penelitian ini berfokus pada kajian teoritis mengenai posisi perempuan dan pendidikan baginya dari perspektif HAM. Penelitian ini mengulas bagaimana ekualitas akses pendidikan yang meliputi sistem persekolahan dan kurikulum serta perlakuan bagi perempuan dengan menggunakan instrumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Adapun distingsi penelitian ini berupa kajian yang diangkat merupakan kajian berbasis lapangan dengan mengambil setting penelitian di Lembaga Pendidikan Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian mengenai gender khususnya dengan <i>Gender Analysis Pathaway</i> (GAP) sebagai Pisau analisisnya
3.	Erma Suriani, Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pengajaran Berbasis Gender (Studi di Pondok Pesantren Kabupaten lombok Barat), <i>Qanwam: Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak LAIN Mataram</i> , Vol. 9 No. 1, 2005	Dalam penelitian ini Pesantren dituntut untuk melakukan re-desaign kurikulum pengajaran, menjadi wacana pembelajaran ber-GSI (Gender Social Inclusion), yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman dan cara belajar peserta didik yang disebabkan oleh konstruksi sosial pada lingkungannya. Dalam implementasi PUG dalam pendidikan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari keseluruhan program, namun PUG diintegrasikan ke dalam strategi pendidikan yang ada, terpadu dan menjadi ruh yang meresap kedalam empat fungsi utama manajemen mutu pendidikan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian/evaluasi. Distingsi yang ingin ditawarkan oleh penelitian ini adalah ikhtiar mengintegrasikan konsep APKM dalam tata kelola manajemen pendidikan khususnya pada Peserta didik.
4.	Amiruddin Mustam, Pendidikan berperspektif Gender	Penelitian ini mengambil <i>angle</i> pembahasan pada bidang multikulturalisme dan gender dalam dimensi pendidikan, namun kajian

---

dan Multikultural, *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2015 yang dibahas dalam tataran teoritis dan normatif, oleh karena itu distingsi yang nampak dari jurnal tersebut berasal dari segi kajiannya, yaitu kajian lapangan (field study) dan penekanannya pada indikator APKM-nya.

---

Berawal dari kegelisahan akademik tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti pembahasan gender yang terkait dalam dunia pendidikan, khususnya sistem segregasinya pada lembaga pendidikan. Ketertarikan tersebut berfokus untuk mengkaji keterkaitannya dalam manajemen peserta didik dan meninjau kembali apakah dalam sistem pendidikan yang menerapkan model Segregasi gender telah menerapkan sistem yang adil, ataukah justru menciptakan pola manajemen yang bias gender sehingga menimbulkan diskriminasi pada peserta didik. Urgensi kegelisahan akademik tersebut dilandasi karena konsep manajemen peserta didik yang diterapkan oleh sebagian besar institusi pendidikan merupakan sistem manajemen tanpa memisahkan laki-laki dan perempuan (*co-education*), namun dalam tataran realitas, terdapat sebagian kecil dari institusi tersebut yang menerapkan sistem segregasi gender dalam kegiatan belajarnya dan hal tersebut tentu berhubungan dengan manajemen peserta didiknya.

Di Yogyakarta banyak Lembaga Pendidikan Islam yang menerapkan sistem segregasi gender, salah satunya adalah Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, yang pada mulanya Yayasan ini merupakan pesantren tradisional (*salaf*) dengan orientasi untuk mencetak para calon-calon *khafidz-khafidhob*. Namun seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan ini mencoba untuk memformulasikan institusinya antara sistem pesantren tradisional dan formal dengan menerapkan standar kurikulum Pemerintah. Salah satu institusi pendidikan Islam

yang menerapkan model segregasi gender adalah MA Sunan Pandanaran yang berlokasi di Sleman Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis pada penelitian ini berpijak pada empat indikator bias gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (lebih lanjut akan disingkat APKM) selain berpijak pada gagasan tersebut penulis juga menggunakan analisis gender yaitu *Gender Analysis Pathway* (lebih lanjut akan disingkat GAP). Kedua aspek ini digunakan untuk membantu penulis dalam mengidentifikasi kesenjangan gender yang ada di lembaga pendidikan. Secara teoritis, terdapat tiga tipologi dalam manajemen peserta didik mengenai sistem Segregasi gender, yaitu tipe manajemen netral; tipe manajemen responsif dan tipe manajemen bias gender. Berdasarkan ketiga tipologi tersebut, penelitian ini akan diarahkan khususnya untuk memotret sistem tata kelola peserta didik dalam manajemen segresi gender.<sup>4</sup>

Lebih lanjutnya lagi, Penulis merumuskan tiga fokus permasalahan yang akan dielaborasi pada Subbab selanjutnya, yaitu mengenai Penerapan Manajemen Peserta Didik terhadap Sistem Segregasi Gender; Analisisnya berdasarkan indikator *Gender Analysis Pathway*, serta Analisisnya dari indikator APKM yang diterapkan di MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif-analisis dalam lingkup penelitian lapangan yang mencoba mengungkapkan kondisi kelembagaan MA Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta dilihat dari sisi peserta didik, peraturan, kebijakan dan implementasinya, serta bentuk relasi laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial sehingga

---

<sup>4</sup> Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa laki-laki atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 103

pendekatan kualitatif digunakan sebagai upaya eksplorasi terhadap dinamika dan kondisi segregasi gender sebagai tindak lanjut penajaman analisis dari data terpilah. Data yang terungkap kemudian dianalisis dari sudut pandang gender dengan menggunakan indikator APKM dan GAP yang bertujuan memberikan masukan bagi strategi, tata kelola dan khususnya pada manajemen peserta didik di MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta, karena data penelitian ini bersumber dari data lapangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Gender dan Manajemen Peserta Didik dalam Setatap Libat*

Pada prinsipnya, gender adalah proses membahasakan atau memberikan simbol terhadap perilaku dan fenomena yang sesungguhnya telah lama ada dan berlaku ditengah kehidupan manusia. Istilah gender merujuk kepada perbedaan bipolaritas karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, serta peranannya dalam masyarakat. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender lainnya yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural<sup>5</sup>.

Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan, budaya maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender

---

<sup>5</sup> Mufidah ch, *Bingkai Sosial Gender Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 210



tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan<sup>6</sup>.

Diskursus mengenai masalah gender, jika diarahkan pada ranah manajemen dalam suatu lembaga pendidikan, maka manajemen berdasarkan perspektif gender dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu: kebijakan netral gender, kebijakan bias gender, dan kebijakan responsif gender<sup>7</sup>. Kebijakan netral merupakan kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan perbedaan situasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan bias gender adalah kebijakan yang mengandung prasangka atau pertimbangan yang negatif terhadap perempuan atau laki-laki, sedangkan kebijakan responsif gender merupakan kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga jenis kebijakan tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai manajemen peserta didik pada MA. Sunan Pandanaran yang mengembangkan model segregasi gender.

Fenomena perbedaan sifat, peran, dan posisi antara laki-laki dan perempuan tersebut sudah menjadi gejala umum maka dalam melihat dan menganalisis fenomena tersebut perlu dibedakan dan dipilah antara kesenjangan gender (*gender gap*), bias gender (*gender bias*), dan ketidakadilan gender<sup>8</sup>. Kesenjangan gender merupakan realitas yang terjadi mengenai adanya perbedaan sifat, peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Realitas ini belum tentu menggambarkan bahwa komunitas atau masyarakat disekitar memiliki pandangan yang bisa gender ataupun mempraktekkan ketidakadilan gender, bisa jadi relitas

---

<sup>6</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 4

<sup>7</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ... 7-8

<sup>8</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,... 21

kesenjangan gender tersebut tidak disadari oleh masyarakat disekitarnya karena merupakan hasil dari proses konstruksi sosial dan budaya yang panjang

Konsep perbedaan jenis kelamin seringkali dirancukan dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial oleh pemahaman masyarakat. Perbedaan jenis kelamin (*sex*) memang berbeda sejak lahir, menjadi hak penuh Tuhan dalam menentukan jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan. Lain halnya dengan perbedaan gender, terjadi melalui proses panjang yang dilakukan oleh manusia (masyarakat) melalui pencitraan, pemberian peran cara memperlakukan dan penghargaan terhadap keduanya. Oleh sebab konstruksi sosial merupakan bentukan dari masyarakat itu sendiri<sup>9</sup>.

#### *Indikator Bias Gender: Gender Analysis Pathway (GAP)*

Manajemen responsif gender adalah sebuah model manajemen yang menyediakan akses yang sama bagi laki-laki maupun perempuan yang berperan di dalamnya serta menghasilkan manfaat yang sama bagi keduanya. Dalam manajemen responsif gender disadari bahwa karakter kerja, kesempatan, hambatan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, akan tetapi keduanya memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam menempati setiap posisi didalamnya dan memperoleh manfaat dari dirinya<sup>10</sup>.

Tujuan dari manajemen responsif gender adalah mendorong terwujudnya prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan sistem manajemen di sekolah atau madrasah yang meliputi

---

<sup>9</sup> Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 2009. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Surakarta: UNS Press, 2009), 56

<sup>10</sup> PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Gender Best Practices: Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 62

fungsi pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di semua tingkat<sup>11</sup>. Responsif gender berarti peka dan memberi tanggapan yang produktif terhadap perbedaan tersebut. Penulis menggunakan pemahaman responsif gender di atas guna menggali nilai-nilai tersembunyi pada MA Sunan Pandanaran yang menerapkan manajemen Segregasi gender. Karakteristik manajemen responsif gender dapat dilihat dari kemandirian, kerja sama, dalam mengelola sekolah atau madrasah dengan menyeimbangkan antara posisi laki-laki dan perempuan dalam setiap komponen sekolah atau madrasah

#### *Manajemen Bias Gender dalam Pendidikan Islam*

Dalam lintasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, salah satu lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem segregasi pada proses pembelajarannya yakni Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang pada mulanya mendirikan pesantren khusus untuk laki-laki pada tahun 1917, kemudian pada tahun 1921 pesantren ini mendirikan lagi sebuah pesantren khusus untuk perempuan. Walaupun santrinya laki-laki dan perempuan akan tetapi sistem pembelajaran pada pesantren ini dipisahkan antara laki-laki dan perempuan hingga saat ini.<sup>12</sup> Tradisi ini diterapkan berlandaskan pada dasar-dasar fiqh zaman pertengahan yang mengharamkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan disatu tempat bahkan mengharamkan munculnya perempuan di ranah publik. Hal ini berdasarkan pada ajaran agama Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh salah satunya adalah kitab *Fanat al-Thalibin* karya Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad

---

<sup>11</sup>PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Gender Best Practices: Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Kalijaga*,...72

<sup>12</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 39

Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i, Mashur, yang menjelaskan tentang larangan *ikhtilath* atau bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat.<sup>13</sup>

Pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara lugas maupun secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran.

Untuk mengarah pada terwujudnya keadilan gender, maka perlu 1) memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan perbedaan pada peserta didik, 2) mengupayakan keadilan gender dikalangan staf dan pimpinan, dan 3) meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung stereotipe negatif. Dari tiga hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan pada pengarusutamaan gender (selanjutnya akan disingkat PUG) dibidang pendidikan setidaknya adalah; kurikulum, evaluasi, pengajar dan kelas, serta peran pemimpin.<sup>14</sup>

PUG merupakan terjemahan dari *gender mainstreaming* yaitu strategi untuk mengintegrasikan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi, serta sebuah agenda pandangan dan tindakan.<sup>15</sup> Kebijakan PUG ini dibuat berdasarkan adanya isu gender dibidang

---

<sup>13</sup> Khalid Mawardi, "Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Wanita, STAIN Purwokerto, Vol.3, No.2, 2008

<sup>14</sup> Suryadi & Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, (Bandung: PT. Grasindo, 2004), 76

<sup>15</sup>Sunaryo, Emma Marhumah, Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Manajemen Berbasis Madrasah Berkesetaraan*, (Jakarta : LAPIS, 2009), 16

pendidikan, khususnya terkait dengan tiga pilar pembangunan yaitu: 1) perluasan dan pemerataan akses dibidang pendidikan, 2) mutu dan relevansi pendidikan, 3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Untuk mencapai pendidikan yang berkesetaraan gender maka BAPPENAS mengembangkan alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway-GAP*) sebagai suatu analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan gender yang ada di lembaga pendidikan.

**Tabel II**

**Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway-GAP*)**

Prosedur	Langkah-Langkah	
Pelaksanaan GAP melalui proses pengisian format untuk memudahkan perumusan hingga penyusunan kebijakan gender dibidang pendidikan.	<b>Pertama :</b> Analisis Kebijakan	Pada tahap pertama melakukan analisis kebijakan responsif gender yang meliputi: tujuan/ sasaran / kebijakan program/proyek kegiatan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan Informasi</li> <li>• Faktor-faktor kesenjangan gender</li> <li>• Isu-isu kesenjangan gender</li> </ul>
	<b>Kedua :</b> Reformulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan kembali kebijakan program/proyek/kegiatan yang responsif gender. Indikator gender untuk mengukur keberhasilan, memperkecil/menghilangkan kesenjangan gender bagi kebijakan yang belum responsif gender. Yang diperlukan adalah indikator gender.</li> <li>• Rencana tindak kebijakan responsif gender yang dirumuskan dalam program kegiatan dan ditentukan sarasannya.</li> </ul>
	<b>Ketiga :</b> Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan terus dilakukan monitoring untuk mengetahui masalah yang muncul pada proses PUG. Ini dilakukan untuk menghindari kendala struktural maupun kultural yang memungkinkan terjadi sebagai dampak dari kurang konsistennya pelaksanaan maupun kesalahan prosedur, serta untuk mengidentifikasi masalah

	gender yang berkembang.
<b>Keempat :</b> Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam semua langkah-langkah/ proses yang dilakukan mulai dari analisis kebijakan responsif gender, reformulasi kebijakan responsif gender, rencana aksi kebijakan responsif gender dan pelaksanaan program.

\*Disarikan dari berbagai referensi tentang Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi analisis gender untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta dapat membantu dalam menyusun rencana atau kebijakan yang digunakan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender, yang hal ini untuk mencapai kesetaraan gender didunia pendidikan. Lebih lanjutnya lagi Suryadi dan Idris berpendapat bahwa faktor-faktor kesenjangan gender bidang pendidikan dikategorikan ke dalam empat indikator, yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Pada bidang pendidikan kesetaraan terhadap akses yakni ketersediaannya sekolah, jarak yang harus ditempuh, biaya serta hambatan dilapangan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara perempuan dan laki-laki. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/keompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini adalah keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Kontrol, dalam penelitian yang berbasis gender, indikator kontrol merupakan piranti untuk melihat adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memutuskan dan mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang diambilnya. Manfaat tercermin dari beberapa aspek, yaitu adanya penikmatan manfaat yang adil dan setara terhadap pemenuhan akan hak

dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki. Beberapa indikator diatas, khususnya dalam ranah akses dan partisipasi bagi peserta didik pada MA Sunan pandanaran Yogyakarta serta dalam analisisnya melalui GAP akan Peneliti paparkan sebagai berikut:

### 1. Komposisi Calon Peserta didik dan Peserta didik

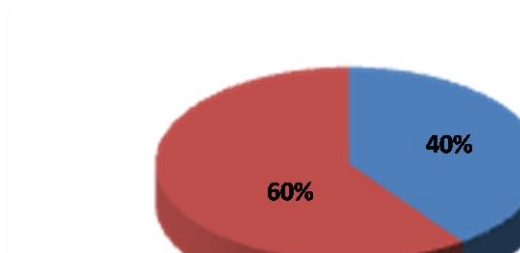
Membahas mengenai jumlah calon peserta didik yang mendaftar dan yang diterima dari perspektif gender perlu disampaikan kondisi rill dari hasil seleksi akhir penerimaan calon peserta didik baru MA Sunan Pandanaran Tahun 2015/2016.

**Tabel III**  
**Jumlah Pendaftar serta Peserta Didik yang diterima**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Tahun Ajaran	Jumlah Pendaftar		Jumlah Diterima	
	LK	PR	LK	PR
2015/2016	249	373	156	265

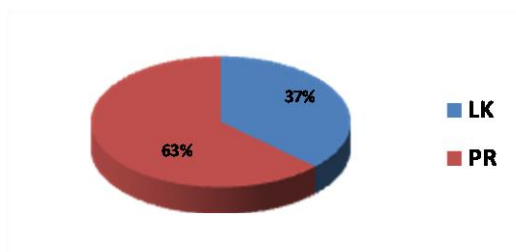
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, Pada tahun 2015/2016 calon peserta didik baru yang mendaftar di MA Sunan Pandanaran berjumlah 622 calon peserta didik dengan rincian 249 (40%) laki-laki dan 373 (60%) perempuan, hal ini dapat diketahui bahwa untuk jumlah pendaftar baik laki-laki maupun perempuan masih didominasi oleh perempuan. Berikut pemaparan perbandingan prosentase jumlah calon peserta didik yang mendaftar antara laki-laki dan perempuan MA Sunan Pandanaran tahun ajaran 2015/2016.

**Grafik Lingkaran I**  
**Jumlah Pendaftar Calon Peserta Didik Baru MA Sunan Pandanaran**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**



Sedangkan untuk jumlah peserta didik yang diterima baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 421 peserta didik dengan rincian 156 (37,05%) peserta didik laki-laki, 265 (62,95%) peserta didik perempuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prosentase peserta didik perempuan lebih mendominasi daripada peserta didik laki-laki. Lebih lanjutnya lagi, berikut pemaparan perbandingan prosentase peserta didik yang diterima antara laki-laki dan perempuan MA Sunan Pandanaran tahun ajaran 2015/2016.

**Grafik Lingkaran II**  
**Jumlah Pendaftar dan Peserta Didik yang di Terima MA Sunan**  
**Pandanaran Tahun Ajaran 2015/2016**



Dari pemaparan di atas Penulis menemukan adanya kesenjangan gender antara jumlah pendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berimplikasi pada adanya



ketimpangan gender bagi kalangan laki-laki untuk mengakses kesempatan belajar di MA Sunan Pandanaran. Kalangan laki-laki tidak memiliki akses dan ruang partisipasi yang sama sebagaimana kalangan perempuan, kalangan laki-laki mendapatkan prosentase yang lebih rendah dari kalangan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait jumlah peserta didik yang diterima bersifat bias gender dengan kecenderungan pada peserta didik perempuan.

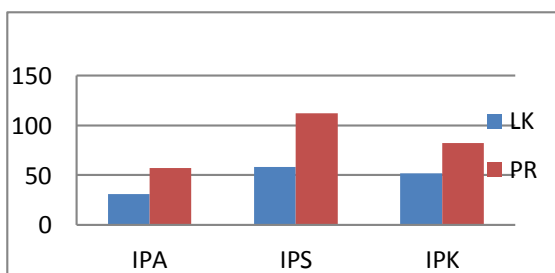
Lebih lanjut lagi terkait pemilihan materi pada kegiatan tersebut yaitu Praktikum kitab, untuk perempuan berisi materi tentang kajian Kitab Fiqih Wanita (*Fiqih Nisa'*) dan untuk laki-laki yaitu kajian Kitab *Ubudiah*. Namun, patut dicermati bahwa perbedaan dalam pemilihan materi bagi peserta didik perempuan, yaitu berupa *Fiqih Nisa'*, cenderung menunjukkan adanya stimulus ataupun usaha rintisan untuk memperkenalkan kajian Fiqih dari perspektif perempuan, sehingga Penulis memandang usaha tersebut sebagai sebuah terobosan positif dalam bidang *Fiqiyah*.

## **2. Komposisi dan Penyebaran peserta didik**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait penempatan peserta didik baru bahwa penyebaran atau penempatan peserta didik secara keseluruhan tahun ajaran 2015/2016 didominasi oleh perempuan, dari jumlah keseluruhan kelas X, kelas XI dan kelas XII yaitu 994 peserta didik, yang terdiri dari tiga jurusan pada masing-masing jenjangnya, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan IPK (Ilmu Pengetahuan Keagamaan). Dengan rincian pada masing-masing kelas dan jurusan, untuk kelas X secara keseluruhan berjumlah 392 peserta didik dengan rincian 251 (64%) perempuan dan 141 (36%) laki-laki. Dengan rincian pada masing-masing jurusan untuk jurusan IPA berjumlah 88 dengan rincian 57 (64,8%) perempuan dan 31

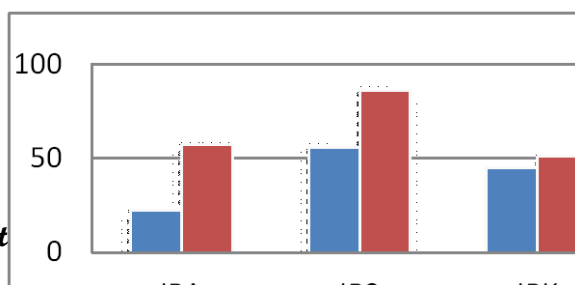
(35,2%) laki-laki, untuk jurusan IPS berjumlah 170 peserta didik dengan rincian 112 (65,9%) perempuan dan 58 (34,1%) laki-laki, dan pada jurusan IPK berjumlah 134 peserta didik dengan rincian 82 (61,2%) perempuan dan 52 (38,8%) laki-laki. Berikut Penulis paparkan grafik terkait prosentase jumlah penyebaran peserta didik kelas X MA Sunan Pandanaran tahun ajaran 2015/2016.

**Grafik 3**  
**Penyebaran Peserta Didik Kelas X**  
**MA Sunan Pandanaran**



Dan untuk kelas XI dari jumlah keseluruhan 317 peserta didik, dengan rincian 194 (61,2%) perempuan dan 123 (38,8%) laki-laki. Jurusan IPA dengan rincian berjumlah 79 peserta didik, terdiri dari 57 (72,2%) perempuan dan 22 (27,8%) laki-laki, untuk jurusan IPS berjumlah 142 peserta didik dengan rincian 86 (60,6%) perempuan dan 56 (39,4%) laki-laki, sedangkan untuk jurusan IPK berjumlah 96 peserta didik, 51 (53,1%) perempuan dan 45 (46,9%) laki-laki. Penulis paparkan grafik terkait prosentase jumlah penyebaran peserta didik kelas XI MA Sunan Pandanaran tahun ajaran 2015/2016.

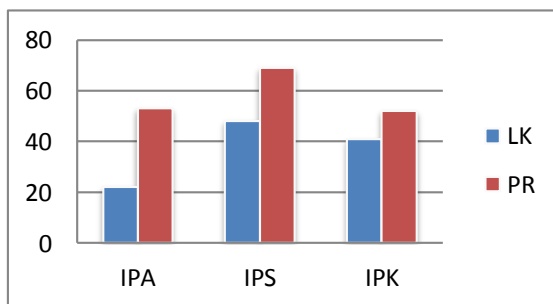
**Grafik 4**  
**Penyebaran Peserta Didik Kelas XI**  
**MA Sunan Pandanaran Tahun Ajaran 2015/2016**



Sedangkan untuk kelas XII, jurusan IPA berjumlah 75 peserta didik, terdiri dari 53 (70,7%) perempuan dan 22 (29,3%) laki-laki, kemudian untuk jurusan IPS berjumlah 117 peserta didik 69 (59%) perempuan, dan 48 (41%) laki-laki, selanjutnya yaitu jurusan IPK, dari jumlah keseluruhan peserta didik yaitu 285, dengan rincian 174 (61,1%) perempuan dan 111 (38,9%) laki-laki. Lebih lanjutnya lagi, Penulis paparkan grafik terkait prosentase jumlah penyebaran peserta didik kelas XII MA Sunan Pandanaran sebagai berikut:

**Grafik 5**

**Penyebaran Peserta Didik Kelas XII MA Sunan Pandanaran**



Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran masing-masing kelas dan jurusan untuk peserta didik semuanya didominasi oleh kalangan perempuan dengan perbedaan prosentasi yang cukup mencolok, dengan demikian maka dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan gender bagi kalangan peserta didik laki-laki. Perempuan memiliki akses dan ruang partisipasi yang lebih besar dibandingkan akses dan partisipasi yang didapatkan oleh kalangan laki-laki. Maka disini dapat disimpulkan bahwa pada proses penempatan peserta didik baru MA Sunan Pandanaran bersifat bias gender.

### **3. *Hai'atut Tholibin Wattolibab*: Sebuah Kegiatan Peserta Didik**

Terdapat beberapa kegiatan yang berada dibawah naungan organisasi intra sekolah di MA Sunan Pandanaran, yaitu *Hai'atut Tholibin Wattholibah* (selanjutnya akan disingkat HTT). HTT merupakan organisasi intra madrasah yang memiliki peran fungsi dan lingkup yang sama dengan istilah OSIS di lembaga pendidikan pada umumnya, organisasi ini dibimbing oleh bapak Nurman Subagyo, S.Pd dan Febri Trifanto, S.T yang berada dibawah naungan Waka bagian kesiswaan.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara kepada ketua HTT periode 2015/2016, Fatih El-Kautsar Muhammad untuk HTT laki-laki dan Tsania Fara Zafira selaku ketua HTT perempuan, senada mereka menjelaskan bahwa;

“Untuk semua kegiatan HTT ini kami laksanakan secara terpisah antara HTT laki-laki dan HTT perempuan, dari segi struktur organisasi maupun pelaksanaannya, masing-masing kami laksanakan secara independen. Akan tetapi masih dalam satu manajemen atau satu pembina bapak Nurman Subagyo, S.Pd dan Febri Trifanto, S.T. setelah pemilihan HTT, dan resmi dilantik jadi ketua kemudian kami menyusun struktur organisasi HTT dengan penanggung jawab masing-masing Devisi, kami secara terpisah merancang agenda masing-masing selama satu tahun dan beserta anggarannya, kemudian kami ajukan kepada pembina, untuk mendapatkan persetujuan, tidak semua agenda yang kami rumuskan di setujui, kemudia agenda-agenda yang disetujui oleh pembina kemudian kami rapatkan secara terpisah antara HTT laki-laki dan perempuan, kemudian kami bentuk penanggung jawab kegiatan, untuk kemudian di realisasikan atau dilaksanakan selama satu periode kedepan”<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk kegiatan HTT ini dilaksanakan secara terpisah antara HTT laki-laki dan HTT perempuan, dari segi struktur organisasi maupun pelaksanaannya, masing-masing dilaksanakan secara independen Elaborasi lebih lanjut

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara Muhammad Marsudi, Waka Bagian Kurikulum, 15 Februari 2016

mengenai kegiatan-kegiatan pada HTT MA Sunan Pandanaran Yogyakarta dapat dilihat pada lembar Lampiran IV.

Dari penjelasan pada lembar Lampiran Tabel IV mengenai Devisi Pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara kuantitas terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai jumlah kegiatan HTT yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Pemahaman terkait kebijakan netral gender belum nampak pada kegiatan ini, khususnya dalam Devisi Pendidikan, dan Keagamaan terdapat kesenjangan gender didalamnya, antara peserta didik laki-laki dan perempuan tidak mempunyai ruang akses dan partisipasi yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk beberapa kegiatan pada devisi pendidikan mengarah pada suatu kebijakan yang bias gender

Hal ini dipertegas dengan kegiatan di Devisi Humas, Devisi Kesenian dan Devisi Olahraga bahwa dari ketiga devisi tersebut secara keseluruhan hanya ada pada HTT laki-laki saja, dari beberapa kegiatan yang nampak pada tabel 17, nampak bahwa dari ketiga devisi tersebut yakni devisi Humas terdapat 4 agenda, devisi Kesenian terdapat 10 agenda dan devisi Olahraga terdapat 6 agenda, namun tidak terdapat satupun agenda yang melibatkan perempuan didalamnya. Disini dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan HTT Devisi “Humas, Kesenian dan Olahraga” mempunyai indikasi muatan bias gender. Dimana antara laki-laki dan perempuan tidak mempunyai akses dan partisipasi yang sama.

#### **4. Analisis melalui *Gender Analysis Pathway* (GAP)**

Analisis GAP ini digunakan untuk membantu para perencana pendidikan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan, mulai dari tahapan aspek analisis kebijakan, reformulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta yang terakhir yaitu tahapan monitoring dan evaluasi. Tahapan

Analisis kebijakan ini berkaitan erat dengan kajian mendalam mengenai kebijakan-kebijakan yang responsif gender dengan pendekatan *Gender Analysis Pathway* (selanjutnya akan disebut GAP) yang meliputi pemaparan secara global mengenai data dan informasi singkat MA Sunan Pandanaran. Pemaparan tersebut sesuai dengan penjelasan dari bapak Marsudi selaku kepala sekolah MA Sunan Pandanaran Yogyakarta, dalam sebuah petikan wawancara :

“Pemangku kebijakan utama disini adalah Kepala Madrasah, dan dalam perumusan kebijakan beliau berpegang teguh pada sejarah Madrasah yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan pondok pesantren yang didirikan oleh seorang kiyai yang ‘Alim, yang sangat memegang teguh nilai-nilai keagamaan, khususnya yang menyangkut kebijakan antara peserta didik laki-laki dan perempuan, bahwa dalam hukum agama, laki-laki dan perempuan tidak boleh bertemu, maka dalam disini perumusan kebijakan terkait peserta didik, dilaksanakan secara terpisah, walaupun dalam satu payung manajemen, kemudian Kepala Madrasah mengkoordinasikan hal ini kepada para pemangku kebijakan di bawahnya, yaitu para Waka dan staff-stafnya”.<sup>17</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MA Sunan Pandanaran memang secara fundamental menerapkan sistem segregasi gender dalam proses pembelajarannya. Adapun klasifikasinya lebih lanjut mengenai model pemisahan gender tersebut sebagai berikut:

**Tabel IV**  
**Kebijakan Manajemen Peserta Didik MA Sunan Pandanaran**  
**Tahun Ajaran 2015/2016**

Lingkup Manajemen Peserta Didik	Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Segregasi	Tidak Segregasi
Penjaringan	Rekrutmen	Pemb. Panitia	-	√
		Persyaratan Pendaftaran	-	√

<sup>17</sup> Hasil wawancara Muhammad Marsudi, Waka Bagian Kurikulum, 15 Februari 2016

	Seleksi	Materi Test Masuk	-	√
	Jumlah yang diterima	Menentukan Jumlah Peserta didik yang diterima(LK, PR)	√	-
	Orientasi	Kegiatan MOSBA	√	-
	Penempatan	Pembagian Jurusan&Kelas	√	-
<b>Pemrosesan/ Pembinaan</b>	Kegiatan Intrakulikuler	Pembelajaran	√	-
		Kegiatan HTT/OSIS	√	-
	Kegiatan Ekstrakulikuler	Kegiatan UKM	√	-
	Tata Tertib		√	-
<b>Kelulusan/Alumni</b>	Mengisi Program Madrasah	Pembekalan University Day	√	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk masing-masing kebijakan yang dilaksanakan dalam dua sistem, yaitu sistem netral dan sistem segregasi, sistem netral yang Penulis maksud disini adalah sebuah kegiatan yang semua pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan, maksudnya disini adalah tidak ada segregasi gender didalamnya, baik dari segi waktu, tempat maupun esensi dari kebijakan tersebut. Dan sistem segregasi yang dimaksud disini adalah sebuah kebijakan atau kegiatan yang dilakukan secara terpisah, dari segi tempat, waktu atau esensi dari kebijakan tersebut. Untuk analisis lebih lanjut terkait pendekatan *GAP* yang berfokus pada bentuk manajemen peserta didik pada MA Sunan Pandanaran. Tahap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan adanya segregasi gender dalam manajemen peserta didik tercermin dalam beberapa poin pembahasan, setidaknya dalam tiga tahap yaitu;

#### **a) Tahap Penjaringan**

Untuk pelaksanaan pada tahap ini mulai dari pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, sampai dengan persyaratan pendaftaran dan beberapa materi test masuk, tidak dilaksanakan secara terpisah, akan tetapi menjadi satu baik dalam waktu ataupun tempat pelaksanaan. Pemisahan

mulai nampak pada proses orientasi serta penempatan peserta didik baru, sudah mulai mengarah pada penerapan sistem segregasi gender, untuk agenda orientasi atau mosba, semua kegiatannya tidak nampak agenda yang berbeda, hanya saja segregasi berlaku untuk waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan, dan untuk kegiatan penempatan ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran dikelas, dimana terjadi pemisahan gedung atau tempat pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan.

#### **b) Tahap Pemrosesan atau Pembinaan**

Untuk tahap pemrosesan atau pembinaan ini berkaitan dengan beberapa kegiatan intra kulikuler, ekstra kulikuler serta yang menyangkut pada beberapa kebijakan terkait tata tertib bagi peserta didik. Untuk semua kegiatan terkait kegiatan baik intra kulikuler maupun ekstra kulikuler semua dilaksanakan secara terpisah, beberapa bentuk kegiatan pun berbeda, tidak ada koordinasi antar peserta didik laki-laki maupun perempuan, semua kegiatan dilaksanakan secara independen, koordinasi hanya dilaksanakan oleh masing-masing ketua dari organisasi peserta didik laki-laki maupun perempuan kepada pembina, yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang guru yang menjabat sebagai Waka bagian kesiswaan yang menangani terkait semua yang menyangkut kegiatan peserta didik. Terkait kebijakan mengenai tata tertib bagi peserta didik di MA Sunan Pandanaran terdapat beberapa kebijakan yang sama serta nampak pula beberapa kebijakan yang berbeda yang diperuntukkan bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan.

#### **c) Tahapan Kelulusan atau Alumni**

Pada tahapan kelulusan dan alumni, berdasarkan wawancara kepada salah satu guru dari MA Sunan Pandanaran, terkait kelulusan para peserta didiknya, baik laki-laki ataupun perempuan sangat diperhatikan, terutama peserta didik yang telah masuk kelas XII, diberikan beberapa fasilitas terkait



studi lanjut ke perguruan tinggi, pihak sekolah menyediakan kemudahan akses bagi para peserta didik berupa internet gratis, selain itu pihak sekolah juga memfasilitasi sebuah kegiatan yang bernama “*University Day*” sebuah agenda khusus kelas XII yang berisi pembekalan terkait pengenalan beberapa perguruan tinggi ternama, hal ini bertujuan supaya para peserta didik mempunyai bekal serta pandangan untuk memilih perguruan tinggi sesuai bakat serta minat mereka, dan agenda ini di isi oleh beberapa alumni MA Sunan Pandanaran yang telah melanjutkan studi ke perguruan tinggi, hal ini mencerminkan bahwa pihak sekolah sangat memperhatikan kebutuhan calon lulusan serta masih menjaga silaturahmi dengan para Alumni, walaupun tidak semua kegiatan terkait Alumni melibatkan pihak Madrasah. Untuk kegiatan ini dilaksanakan secara terpisah, antara peserta didik laki-laki maupun perempuan

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan manajemen peserta didik di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta dalam penerapan sistem segregasi gender dapat diklasifikasikan dalam manajemen yang bias gender dan manajemen yang netral gender. Dari analisis yang bersumber dari tingkat akses dan partisipasi peserta didik, dapat diketahui bahwa terdapat perbandingan peserta didik perempuan yang mampu mengakses dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas dibandingkan dengan peserta didik laki-laki. Kecenderungan tersebut mengarah kepada peserta didik perempuan dan hal tersebut berimplikasi pada tata kelola yang dilakukan oleh MA Sunan Pandanaran Yogyakarta. Pada analisis berdasarkan pada *Gender Analysis Pathway*, ditemukan bahwa pada kegiatan siswa Intra sekolah (*Hai'atut Tholibin Wattolibab*) mengandung indikasi manajemen peserta didik yang bias gender, hal tersebut tercermin pada beberapa aktifitas yang memiliki kecenderungan kepada salah satu jenis

kelamin, misalnya aktifitas khusus HTT laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Pada sisi yang lain, tahapan penjarangan, pembinaan dan kelulusan peserta didik tidak ditemui indikasi bias gender yang signifikan, oleh karena itu bisa dikategorikan dalam lingkup manajemen yang netral gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Mustam, Pendidikan berperspektif Gender dan Multikultural, *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2015
- Bahrul Hayat, Perempuan dan Pendidikan dalam Perspektif HAM, *Millah: Jurnal Studi Agama UII* Vol. XII, No. 1, Agustus 2012
- Dhofier, Zamakhsari, 1982, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES,
- Engkoswara dan Hj. Aan Komariah, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Erma Suriani, Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pengajaran Berbasis Gender (Studi di Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Barat), *Qanwam: Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak LAIN Mataram*, Vol. 9 No. 1, 2005
- Fakih, Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Humaidi, Anis, Evi Muafiah, Masnun Tahir, Asliah Zainal, Rubaidi, 2013, *Problematisa Pemikiran Islam Kontemporer Tantangan bagi Wacana Islamologi di Indonesia*, Yogyakarta: Maghza Pustaka
- Imron Ali, 2012, *Manajemen Peserta Siswa Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Iwan Sudrajat dan Bambang Triyoga, Segregasi Gender dalam Organisasi Spasial Pesantren di Pulau Jawa, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB)*, Vol. 27, No. 2, Agustus 2016
- Marhumah Ema, 2011, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa laki-laki atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta: LKIS
- Mawardi, Khalid, 2008, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, “Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda”, Pusat Studi Wanita, STAIN Purwokerto, Vol.3, No.2

- Mufidah ch, 2010, *Bingkai Sosial Gender Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN Maliki Press
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Surakarta: UNS Press
- PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, *Gender Best Practices: Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga
- Siti Zubaidah, 2010, *Jurnal Yin Yang*, “Mengurai Problematika Gender dan Agama”, IAIN Purwokerto, Vol. 5 No. 2 Jul-Des
- Sunaryo, Emma Marhumah, Inayah Rohmaniyah dkk, 2009, *Modul Manajemen Berbasis Madrasah Berkesetaraan*, Jakarta : LAPIS
- Susilaningsih dkk, 2004, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, Baseline and Analysis For Gender, Mainstreaming in LAIN Sunan Kalijaga*, UIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan McGill-IAIN-Indonesia Sosial Equity Project
- Suryadi & Idris, 2004, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: PT. Grasindo

## **Wawancara**

- Wawancara Marsudi, S. Si, Waka Bagian Kurikulum serta Staf Evaluasi Pengajaran, tanggal 15 Februari 2016
- Wawancara Patih El-kautsar Muhammad, Ketua HTT Laki-laki dan Tsania Fara Zafira, Ketua Perempuan, tanggal 28 Februari 2016